

SINOPSIS

Good governance adalah mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik secara baik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (*privat sektor*). Konsep *good governance* akan relevan apabila di implementasikan pada sektor pemerintahan, mengingat kondisi tata pemerintahan di Indonesia saat ini belum bekerja secara maksimal dan optimal. Tanpa terkecuali di Pemerintahan Kabupaten Temanggung. Maka hal ini masih sangat perlu untuk dikaji lebih dalam dan dilakukan penelitian.

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yang berusaha menggambarkan secara jelas segala kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mengenai perannya dalam mewujudkan *good governance*. Untuk mendapatkan data ini penulis menggunakan prosedur penelitian antara lain; wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini didasari oleh penelitian lapangan, tahap analisis dengan mengambil perumusan untuk dipecahkan agar menjadi kesimpulan dengan mengaitkan secara intensif dengan latar belakang masalah yang diteliti.

Dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Temanggung, di implementasikan melalui beberapa peran yang saling berkaitan, seperti: Wawasan ke Depan, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung jawab, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, responsif, keefisienan dan keefektifan, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada lingkungan hidup, komitmen pada pasar, serta didukung dengan peran stakeholders dalam membangun pemerintahannya. Konsep *good governance* merambah ke daerah sebagai bentuk otonomi. Salah satunya di kabupaten Temanggung. Penerapan ini berguna untuk memperbaiki sistem pemerintahan, yang sebelumnya segala kebijakan bersifat sentralistik.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan *good governance*, dengan melalui beberapa prinsip diatas, sudah mengindikasikan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kemajuan dalam berbagai bidang di Kabupaten Temanggung misalnya dalam kestabilan pendidikan, ekonomi, dan politik. Yaitu partisipasi masyarakat yang semakin massif, peningkatan home industri, dan terpenuhinya fasilitas publik. Namun, Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan *good governance* ini masih menemui persoalan, misalnya masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai konsep *good governance*, dan belum meratanya tingkat pendidikan di masyarakat kelas bawah. Maka Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat mewujudkan *good governance* ini, perlu adanya sosialisasi mengenai konsep *good governance* kepada masyarakat dan peningkatan pendidikan masyarakat dikalangan bawah.